

MENCIPTAKAN EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT YANG MAJEMUK

Ni Kadek Ayu Kristini Putri

Universitas Tabanan

kadek.ayukristini27@gmail.com

ABSTRAK

Moderasi beragama telah menjadi wacana strategis dalam upaya membangun sikap dan cara berpikir inklusif dalam beragama. Gerakan moderasi beragama dianggap penting untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga dan merawat relasi sosial yang harmonis antar sesama umat beragama, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu agama. Gerakan moderasi ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan ekosistem moderasi. Artikel ini berupaya membahas pentingnya menciptakan ekosistem moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan studi literatur, dengan melakukan *review* terhadap satu referensi dan referensi yang lain yang berkaitan dengan ekosistem moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem moderasi yang terdiri dari masyarakat, tokoh atau pemuka agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah sangat penting perannya dalam menciptakan moderasi beragama. Semua komponen ini harus memiliki komitmen untuk menciptakan iklim moderasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Jika salah satu dari komponen ekosistem moderasi itu tidak memiliki komitmen membangun moderasi beragama, maka gerakan moderasi beragama tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: ekosistem, moderasi beragama, masyarakat majemuk.

ABSTRACT

Religious moderation has become a strategic discourse in an effort to build an inclusive attitude and way of thinking in religion. The religious moderation movement is considered important to build awareness of the importance of

maintaining and caring for harmonious social relations between fellow religious people, so that they are not easily provoked by religious issues. This moderation movement can be done by creating a moderation ecosystem. This article attempts to discuss the importance of creating a religious moderation ecosystem in the midst of a pluralistic society. This study uses a literature study, by reviewing one reference and another reference related to the moderation ecosystem. The results of the study show that the moderation ecosystem consisting of society, religious figures or leaders, political institutions, educational institutions, media, and government plays a very important role in creating religious moderation. All of these components must have a commitment to creating a climate of moderation in the midst of a pluralistic society. If one of the components of the moderation ecosystem does not have a commitment to building religious moderation, then the religious moderation movement will not be achieved as expected.

Keywords: ecosystem, religious moderation, pluralistic society.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki tantangan yang serius ke depan, tidak hanya tantangan di bidang ekonomi, persaingan sumber daya manusia dan teknologi, tetapi juga tantangan internal. Keberagaman suku, etnik dan agama di Indonesia menjadi keniscayaan sekaligus tantangan. Menurut Paramita (2019: 143) Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan konflik sosial horizontal. Ada tarik menarik kepentingan antara kelompok yang menginginkan agar Indonesia sebagai Negara Islam, sebaliknya ada yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara karena sudah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang sangat heterogen baik dari segi suku, agama, etnis dan budaya. Dua gerakan ini selalu muncul dalam perhelatan-perhelatan politik tingkat nasional, bahkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa, Indonesia masih sangat rentan pada persoalan-persoalan ideologis. Konflik ideologis ini selalu mewarnai politik di Indonesia.

Fenomena yang berkembang di Indonesia belakangan ini adalah semakin tingginya intensitas konflik yang bernuansa agama. Sebagaimana dapat diikuti dari unggahan di media sosial tentang semakin banyak masyarakat yang menjelek-jelekan agama orang lain dan berita tentang konflik yang dilandasi agama. Gerakan-gerakan ekstrem dan bahkan fundamentalis yang mengatasnamakan identitas tertentu menjadi penghambat terlaksananya tujuan negara sehingga sekelompok yang melakukan gerakan tersebut adalah kelompok radikalisme. Sugiarti (2021:125) menjelaskan radikalisme dengan tiga karakteristik.

Pertama, radikalisme merupakan sebuah respon dalam bentuk evaluasi, penolakan atau penentangan gagasan lembaga atau nilai. *Kedua*, radikalisme

merupakan ideologi yang mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan secara mendasar atas apa yang ditolak agar sesuai dengan kondisi yang dicita-citakan. *Ketiga*, radikalisme menuntut kepercayaan tinggi para aktornya terhadap ideologi ataupun program yang ditawarkan. Umumnya gerakan-gerakan ini secara eksplisit merupakan gerakan keagamaan yang membawa ideologi tertentu dan bermaksud menggeser posisi ideologi negara Pancasila dengan mensentralkan ideologi khilafah.

Gerakan keagamaan yang tidak moderat ini masih membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah berupaya menggetoktulkankan kesadaran beragama yang inklusif dalam bentuk moderasi beragama. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Tujuan dari penguatan moderasi beragama sebagai upaya membentuk sikap moderat masyarakat khususnya generasi muda yang cenderung lebih cepat mengadopsi pengaruh-pengaruh luar tanpa adanya filterisasi secara tegas. Apalagi pada era disrupsi digital, perolehan berbagai informasi secara tidak langsung banyak mengandung ideologi tertentu dan bahkan eksklusif sehingga tanpa disadari pengaruh tersebut terserap ke dalam kesadaran individu dan memproyeksikan sikap ekstrem dan fundamentalisme dalam kehidupan (Sugiarti & Roqib, 2021:127). Dengan adanya penguatan moderasi, hal utama yang menjadi prinsip adalah pembentukan sikap yang sewajarnya, mengingat karakteristik masyarakat secara umum di Indonesia adalah heterogen dengan menguatnya mobilitas sosial serta ekspansi atau perluasan informasi setiap saat.

Upaya membangun kesadaran beragama yang moderat atau moderasi beragama perlu didasari dengan membangun ekosistem moderasi beragama. Ekosistem moderasi yang dimaksud terdiri dari masyarakat, tokoh atau pemuka agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Semua komponen ini sangat penting perannya dalam menciptakan iklim beragama yang moderat. Artikel ini berupaya membahas perihal ekosistem moderasi tersebut.

II. METODE

Dalam sebuah penelitian diperlukan metode atau teknik dalam pengumpulan data. Khusus untuk penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur dan dokumen yang berhubungan dengan moderasi beragama. Sarwono (2006) menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari

masalah yang di akan teliti. Study literatur disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010) yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data antara lain yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Indikator Moderasi Beragama dalam Masyarakat

Kata “moderasi” memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata “moderasi” berasal dari kata *moderation*, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata *moderator*, yang berarti ketua (*of meeting*), pelera, penengah (*of dispute*). Kata *moderation* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “moderasi” berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kata ini adalah serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata “moderator” berarti orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya), pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah, alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga.

Jadi, ketika kata “moderasi” disandingkan dengan kata “beragama”, menjadi “moderasi beragama”, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (radikalisme) dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan mempersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia.

Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah pelbagai desakan ketegangan (*constrains*), seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme.

Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, mengimbasi kehidupan

persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan moderasi beragama memiliki beberapa aspek dan indikator di dalamnya. Menurut pandangan Ali Ramdhani (2019: 34) ada beberapa aspek dari moderasi beragama yakni toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi dan komitmen kebangsaan.

Komitmen Kebangsaan

Penguatan komitmen kebangsaan bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Komitmen kebangsaan ialah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Tanpa adanya komitmen kebangsaan dari warga yang konsisten, maka negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya. Menurut Anderson (2008), arti kebangsaan tidak semata merujuk pada latar belakang sejarah, nasib bersama, suku, bahasa kebudayaan serta religi. Namun, lebih dari itu, kebangsaan merupakan apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang dirinya dan sesamanya dalam masyarakat. Selain itu, ada beberapa komponen dari komitmen kebangsaan yakni cinta pada tanah air, membina persatuan, rela berkorban, senantiasa menanamkan sikap dan perilaku mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap membina persatuan dan kebersamaan ini sangatlah penting untuk membangun kesadaran di kalangan generasi muda perihal kebangsaan, bahwasannya meskipun berbeda keyakinan, berbeda etnis, dan suku, semua mahasiswa memiliki bangsa dan tanah air yang sama yakni Indonesia. Artinya, semangat ke-Indonesiaan ini akan mengikis fanatisme sempit yang dibangun melalui narasi-narasi keagamaan yang sempit dan parsial. Tidak hanya itu saja, komitmen kebangsaan juga dibangun melalui sikap rela berkorban demi bangsa dan negara.

Kecintaan terhadap negara sangat penting dipupuk di dalam diri masyarakat terutama generasi muda Indonesia agar mereka tidak mudah terpapar ideologi-ideologi radikal yang justru ingin mengubah dasar negara dan membangun negara yang berbasiskan pada ideologi satu agama saja. Penguatan komitmen kebangsaan sebagai salah satu pilar moderasi beragama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menumbukan rasa persatuan persaudaraan dan kecintaan terhadap tanah air.

Hal ini sejalan dengan pandangan Suwarni (2021:22) bangsa memperkuat komitmen kebangsaan di Indonesia merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh warga bangsa Indonesia sebagai acuan untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang multikultur dan multireligius. Komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau

kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara.

Nilai Toleransi

Selain membangun komitmen kebangsaan melalui pengamalan nilai Pancasila dan upaya penanaman nilai persatuan, kebersamaan dan rasa cinta terhadap tanah air, moderasi beragama juga dibangun dengan cara menjaga dan merawat kerukunan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Salah satunya adalah menciptakan suasana keberagamaan yang toleran dan saling pengertian. Toleransi merupakan aspek penting dalam menguatkan moderasi beragama.

Jika toleransi merupakan salah satu indikator dari moderasi beragama, maka sikap toleransi mesti terbangun secara otentik, tidak hanya secara formal. Toleransi otentik adalah toleransi yang terbangun pada level pemahaman kehidupan beragama. Seseorang toleran memang karena telah memiliki pemahaman bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Toleransi ini berada pada level kognitif, pengetahuan yang melahirkan empati dan simpati. Sementara toleransi non otentik adalah sikap yang hanya ditunjukkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan formil, seperti seseorang menyerahkan bantuan kepada umat berbeda agama untuk membangun citra politik, bukan untuk kemanusiaan itu sendiri. Toleransi yang non otentik ini sering terlihat dalam kehidupan politik di Indonesia.

Secara kategori, toleransi terbagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, toleransi pasif, yaitu setiap pemeluk agama membiarkan tanpa menghalang-halangi pemeluk agama lain menyatakan dan mengekspresikan keimanannya. Kedua, toleransi aktif, yaitu suatu sikap membantu pemeluk agama yang berbeda untuk melaksanakan keyakinan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Dalam paradigma lama kehidupan beragama, kegiatan dakwah atau misi agama-agama kerap kali diwarnai dengan prasangka teologis sepihak dengan klaim-klaim sepihak dan memosisikan orang yang berbeda keyakinan sebagai musuh yang harus ditaklukan. Dalam paradigma baru, sikap yang ditumbuhkan adalah *mutual respect*, saling mengakui eksistensi (*mutual recognition*), berpikir dan bersikap positif terhadap penganut agama lain (Misrawi, 2009).

Penghargaan Terhadap Tradisi dan Budaya

Selain penguatan komitmen kebangsaan dan menjaga kerukunan beragama, upaya penguatan moderasi beragama juga dilakukan melalui pengenalan dan penghargaan masyarakat yang majemuk terhadap tradisi dan budaya lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultur di Indonesia, moderasi beragama bukan pilihan melainkan keharusan (Balitbang,

Kemenag 2019). Tradisi dan budaya merupakan warisan peradaban yang telah melalui proses sejarah yang panjang sekaligus menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Kemajemukan Indonesia juga ditunjukkan dengan perbedaan tradisi dan budayanya. Oleh sebab itu, penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal merupakan kewajiban sekaligus pengakuan akan identitas bangsa Indonesia yang heterogen.

Kemanusiaan dan Anti Kekerasan

Sesuai kajian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, maka dikristalisasikan indikator moderasi beragama sebagai langkah awal yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*local wisdom*). Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya bisa menemukan atau mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Tentu keempat ini bukanlah harga mati, tetapi boleh jadi nanti akan mengalami pengembangan atau pengurangan dan/atau perubahan akan sangat bergantung pada hasil kajian, riset dan penelitian. Namun demikian untuk saat ini dirasakan keempat indikator itu masih relevan untuk dijadikan ukuran.

Ayudhya (2008) berpendapat nilai-nilai kemanusiaan adalah pilar utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Lima nilai kemanusiaan yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kedamaian, Kasih Sayang dan Tanpa Kekerasan merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika satu nilai hilang maka semua nilai yang lain akan hilang. Sebagai contoh: jika tidak ada kasih sayang dan belas kasih, maka orang itu tidak mempertimbangkan orang lain terlebih dahulu tetapi lebih mementingkan diri sendiri, maka kebajikan akan hilang.

Orang itu akan tidak merasakan kedamaian bila tidak ada cinta kasih. Jika tidak ada kedamaian, maka kesadaran tidak bisa diangkat ke super sadar sehingga nilai kebenaran akan hilang. Tanpa kedamaian, kasih sayang, kebenaran dan kebajikan maka akan terjadi kekerasan (*violence*). Nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diajarkan, mereka harus dibangkitkan dari dalam diri masyarakat. Transformasi seseorang tidak bisa terjadi hanya melalui pengajaran, tetapi dapat dicapai melalui upaya-upaya membangkitkan kesadaran diri (*selfrealization*).

3.2 Ekosistem Moderasi Beragama

Dalam upaya penguatan hubungan antara agama dan negara, pihak pemerintah telah menetapkan penguatan moderasi beragama melalui Perpres 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Yang dimaksud dengan penguatan moderasi beragama yakni memoderasi pemahaman dan pengamalan

ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Moderasi Beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Penguatan Moderasi Beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Perlu ditekankan di sini bahwa penguatan moderasi beragama bukan upaya memoderasi agama, tapi memoderasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta umat beragama dan penghayat kepercayaan melaksanakan penguatan Moderasi Beragama dengan mengemban 3 (tiga) misi besar, meliputi: a. memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat; b. mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan; dan c. memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam koridor *kebhinnekaan* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, ada beberapa faktor penting dalam ekosistem atau kelompok strategis dalam moderasi beragama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai berikut.

Masyarakat

Masyarakat sangat penting perannya sebagai kelompok strategis dalam mewujudkan penguatan moderasi beragama. Cara pandang, sikap dan praktik keagamaan di dalam masyarakat sangat menentukan upaya penguatan moderasi beragama. Kelompok masyarakat yang dimaksud di sini yakni individu, keluarga, anak, pemuda dan perempuan. Artinya, penguatan moderasi beragama juga mesti didukung oleh kelompok masyarakat ini.

Masyarakat

Selain masyarakat, pendidikan juga sangat berperan dalam mewujudkan moderasi beragama, sekaligus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswanya. Pada ranah perguruan tinggi, perlu diciptakan ekosistem moderasi dari kurikulum, Sumber Daya Manusia atau civitas akademika sampai pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semua elemen ini mesti terlibat dalam upaya penguatan moderasi beragama. Jika cita-cita moderasi tidak didukung oleh lembaga

pendidikan, maka akan sulit mewujudkannya, karena lembaga pendidikan tempat sistem nilai, ideologi dan cita-cita bangsa ditanamkan kepada generasi. Lembaga pendidikan tinggi juga perlu mengintegrasikan penguatan moderasi beragama dalam kurikulum dan mengembangkan kajian keilmuan lintas-disiplin.

Keagamaan

Keberhasilan penguatan Moderasi Beragama sangat ditentukan oleh pemuka agama dan kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kepercayaan dalam mengelola rumah ibadat, pendidikan agama dan kepercayaan, penyiaran agama dan kepercayaan, dan menyikapi praktik menjadikan agama dan kepercayaan sebagai komoditas. Pemuka agama memiliki peran penting dalam memoderasi pemahaman, sikap dan cara pandang umat beragama. Secara sosiologis, masyarakat di Indonesia memiliki ketaatan pada pemuka adat dan agama mereka. Para pemuka agama menjadi teladan masyarakat dalam memahami agama. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan para pemuka agama dalam upaya penguatan moderasi beragama.

Media

Penguatan Moderasi Beragama menghadapi tantangan perkembangan industri media komunikasi dan informasi yang sangat cepat. Media menjadi salah satu faktor terpenting penguatan Moderasi Beragama, karena terkait dengan komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, dan disrupsi otoritas keagamaan. Media sosial selama ini tidak hanya berperan memberi informasi, tetapi juga berpotensi memecah belah umat dengan konten-konten yang provokatif. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan pada pengelola media termasuk media sosial untuk ikut serta dalam penguatan moderasi beragama.

Politik

Dunia politik sangat berpengaruh dalam menentukan orientasi atau kebijakan pemerintah. Keberhasilan penguatan Moderasi Beragama sangat ditentukan juga oleh praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, di mana populisme politik dan agama sering menjadi konsumsi politik dan beririsan dengan isu agama. Para politisi seyogyanya jangan menggunakan isu-isu primordial, termasuk isu agama hanya untuk kepentingan politik, karena implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan isu agama dalam ranah politik sangat besar. Bahkan tak sedikit bisa memecah belah umat. Oleh sebab itu, lembaga politik termasuk praktik politik mesti menghindari penggunaan isu agama untuk kepentingan politik.

Negara

Infrastruktur negara sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penguatan Moderasi Beragama, termasuk di dalamnya adalah ideologi negara, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan serta regulasi. Negara, dalam konteks ini pemerintah mesti gencar bekerjasama dengan *stakeholder* dan pemangku kepentingan untuk turut serta dalam upaya atau mewujudkan moderasi beragama. Persoalan yang sering terjadi adalah ketika ada pergantian kekuasaan, maka disusul dengan pergantian kebijakan. Di sini, perlu komitmen negara untuk terus mengupayakan terbentuknya ekosistem moderasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.



Gambar 3.1 Ekosistem Moderasi atau Kelompok Strategis

IV. PENUTUP

Moderasi beragama telah menjadi wacana strategis dalam upaya membangun sikap dan cara berpikir inklusif dalam beragama. Gerakan moderasi beragama dianggap penting untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga dan merawat relasi sosial yang harmonis antar sesama umat beragama, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu agama. Gerakan moderasi ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan ekosistem moderasi. Ekosistem moderasi yang terdiri dari masyarakat, tokoh atau pemuka agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah sangat penting perannya dalam menciptakan moderasi beragama. Semua komponen ini

harus memiliki komitmen untuk menciptakan iklim moderasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Jika salah satu dari komponen ekosistem moderasi itu tidak memiliki komitmen membangun moderasi beragama, maka gerakan moderasi beragama tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti. 2019. *Moderasi Beragama Menurut Pandangan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Dharmaputra, Eka. 2017. *Pancasila Identitas & Modernitas*. (Edisi Revisi). Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Nisa, Muria Kushnun, dkk. 2021. Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. Dalam *Jurnal Riset Agama 1 (3)* (79-93).
- Parekh, Bhiku. 2008. *Rethinking Multiculturalism. Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Paramita, I. G. A. (2019). *Representasi Nilai Pancasila Dalam Kebudayaan Bali*. Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2(2), 142–154. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suda, I Ketut & Watra, I Wayan. 2022. *Toleransi dalam Kehidupan Beragama*. Denpasar UNHI PRESS.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.